

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam proses demokratisasi yang tengah berjalan di negeri ini, masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Masyarakat memiliki hak atas arah berjalannya suatu pembangunan yang ingin dikehendaki. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kolektif masyarakat yang terlepas dari kepentingan pihak manapun baik itu individu atau golongan. Pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengeluarkan semua permasalahan yang dihadapi nantinya menemukan solusi bersama. Dengan begitu masyarakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan. Proses pembangunan yang telah terjadi merupakan hasil usaha dari pemerintah semata sebagai kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik yang dibutuhkan publik, akan tetapi hal itu perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik dan tepat sasaran maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah mempunyai peranan sangat strategi dalam menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut, memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam suatu forum daerah yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Atau Musrenbang. Musrenbang menjadi ruang publik yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat serta keluhan masyarakat terkait pembangunan kedepan mulai dari mengenali masalah, kebutuhan, tantangan eksternal, potensi yang ada serta penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, musrenbang pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Musrenbang menurut UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Di tingkat masyarakat, tujuan Musrenbang adalah untuk mencapai kesepakatan tentang program prioritas departemen pemerintah daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah-SKPD) yang akan didanai dari anggaran tahunan lokal APBD dan dana alokasi desa, dan untuk memilih masyarakat dan pemerintah sebagai perwakilan yang akan menghadiri Musrenbang di

tingkat kecamatan. Adanya potensi dan permasalahan yang sangat mempengaruhi pembangunan di daerah tertinggal secara keseluruhan, makanya diharapkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dapat melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan yang berorientasikan pada masyarakat luas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat, berwawasan lingkungan dan tidak diskriminatif. Permasalahan yang terjadi di daerah tertinggal yang cukup mendasar salah satunya adalah tingkat aksesibilitas yang masih rendah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya, Nagari Banai berada di Kecamatan IX Koto. Nagari Banai memiliki luas wilayah Nagari 226.09 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 3.144 jiwa yang terdiri dari 1.357 jiwa laki-laki dan 1.560 jiwa perempuan. Nagari Banai memiliki jarak dari pusat ibukota Kabupaten yaitu 57 Km dengan aksesibilitas masih dominan dalam kondisi rusak, baik itu rusak ringan dan rusak berat, untuk itu perlunya perencanaan pembangunan aksesibilitas di Nagari Banai ini dilakukan dengan mengusulkan program sesuai dengan kebutuhan Nagari Banai yang disebut dengan Musrenbang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2017 dan 2018 telah ditemukan beberapa kesenjangan yang terjadi seperti kurang efektif dan efisiennya dalam pembangunan aksesibilitas tersebut dilihat dari perbandingan program pelaksanaan Musrenbang melalui dokumen yang terkait, mengetahui kendala pelaksanaan program dan kesesuaian rencana indikasi program Musrenbang di Nagari Banai, untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap program Musrenbang sudah terlaksanakan atau masih kurang.

Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan yang terjadi untuk dijadikan penelitian yang berjudul Evaluasi Program (Musrenbang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari Banai di Kabupaten Dharmasraya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dapat di rumuskan pada kegiatan ini adalah dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Nagari Banai Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya maka perlu didukung dengan aksesibilitas yang baik dan memadai. Akan tetapi pada kondisi eksisting belum terdapat pembangunan yang signifikan. Oleh sebab itu diperlukan penilaian terhadap program pelaksanaan Musrenbang Nagari Banai di Kabupaten Dharmasraya

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

Mengevaluasi program pelaksanaan Musrenbang Nagari Banai di Kabupaten Dharmasraya yang dilihat dari pengembangan Nagari melalui penilaian program pembangunan dan pengembangan aksesibilitas yang ada di Nagari Banai

#### **1.3.2 Sasaran Penelitian**

Adapun sasaran dari penelitian adalah sebagai berikut:

- Menilai program Musrenbang yang telah terlaksana yang terdapat pada dokumen yang terkait
- Mengetahui kendala terhadap program – program yang belum terlaksana sebagaimana yang telah di targetkan di dalam program pembangunan dan pengembangan
- Dapat mengetahui manfaat terhadap program – program yang telah terlaksana

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis maupun teoritis bagi pengembangan ilmu, khususnya: masyarakat atau penduduk setempat, pemerintah/instansi terkait, dan kalangan akademis, sebagai bahan pustaka guna pengembangan ilmu dan penelitian selanjutnya.

### **1.5 Ruang Lingkup**

#### **1.5.1 Ruang Lingkup Materi**

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini yakni berorientasi pada materi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, khususnya yang membahas tentang evaluasi program Musrenbang yang terkait dengan pembangunan aksesibilitas yang dapat menunjang pengembangan dan pembangunan Nagari Banai guna untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan wilayah, menilai indikasi program dalam dokumen Musrenbang dan beberapa faktor yang menjadi suatu standar didalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Nagari tersebut.

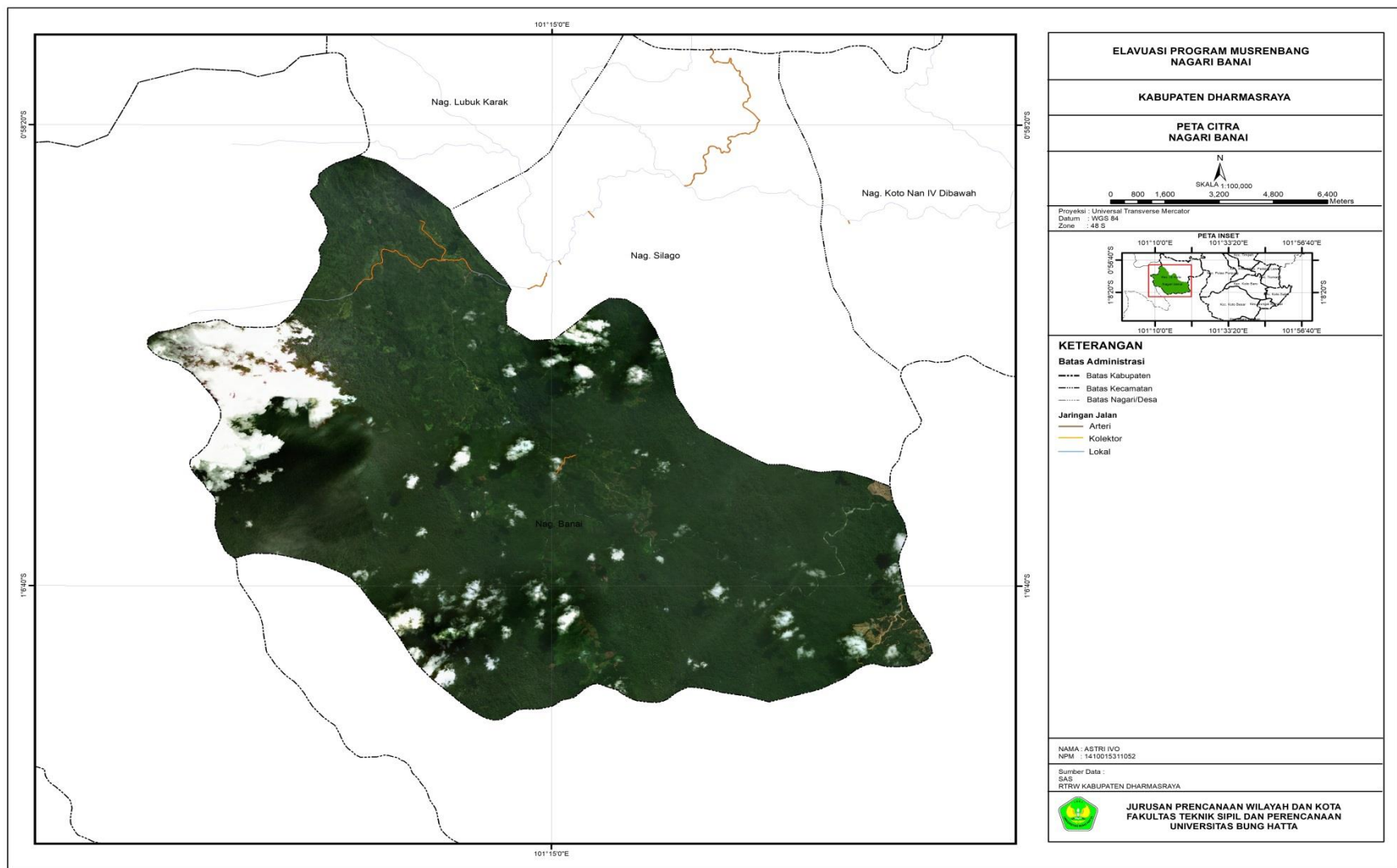
### **1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah Studi**

Ruang lingkup penelitian terdapat pada administrasi Nagari Banai yang memiliki batas-batas administrasi yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Solok Selatan
- Sebelah Selatan : Nagari Silago
- Sebelah Timur : Nagari IV Koto Dibauh
- Sebelah Barat : Kabupaten Solok

Untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup wilayah studi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Peta CitraNagari Banai



Sumber : Hasil Survey, 2021

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode pendekatan dan metode pengumpulan data, yang dijelaskan sebagai berikut:

### **1.6.1 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. (Kasiram (2008:149)). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan yang akan dicapai, tidak hanya menggunakan pendekatan kuantitatif, akan tetapi juga menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. (Saryono)

### **1.6.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa data primer dan sekunder, serta menjelaskan bagaimana cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.6.2.1 Pengumpulan Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder dilakukan ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar dan BPS Kabupaten Dharmasraya. Survei ini bertujuan untuk memperoleh data-data mengenai Nagari Banai. Selanjutnya survei dilakukan ke Kantor Wali Nagari Banai untuk mendapatkan data tentang dokumen Musrenbang

#### **1.6.2.2 Pengumpulan Data Primer**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan tinjauan dan pengumpulan data secara langsung dari kondisi yang ada di lapangan. Perolehan data tersebut menggunakan metode wawancara serta observasi langsung. Metode ini dilakukan untuk melengkapi data yang tidak ada pada data sekunder.

**a. Observasi**

Survey primer /melakukan observasi berupa peninjauan langsung ke lokasi kawasan studi dengan tujuan untuk mengetahui kondisi eksisting dilapangan dan mengetahui program yang sudah terlaksana dan belum terlaksana.

**b. Wawancara**

Melakukan wawancara adalah satu metode yang digunakan dalam survey primer, diantaranya untuk mendapatkan data sosial, budaya dan ekonomi yang tidak diketahui sebelumnya pada saat melakukan observasi ataupun pada data sekunder. Dengan melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan seperti Wali Nagari Banai, Perangkat Nagari Banai dan masyarakat setempat.

**1.6.2.3 Cara Pengumpulan Data**

Tahapan persiapan survey merupakan langkah awal dalam suatu perencanaan. Tahapan ini bertujuan untuk mempermudah dalam tahap pengumpulan data, baik itu data survey primer dan survey sekunder. Dalam tahap ini ada beberapa tahap yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

**a. Tahap Persiapan**

- Pada tahap ini merupakan pengumpulan studi literature dengan perlunya teori-teori yang akan dijadikan sebagai acuan dalam evaluasi program pelaksanaan kawasan transmigrasi
- Alat yang dibutuhkan survey, sebagai penunjang dan mempermudah peneliti dalam melakukan survey yaitu seperti kamera, peta dasar dan keperluan lainnya.

**b. Tahap survey**

Tahap ini berbeda dengan survey sekunder dan survey primer, perbedaannya yaitu survey yang dilakukan ke instansi dengan perolehan berupa data sekunder termasuk juga didalamnya literature dan standar-standar yang terkait.

**1.6.3 Metode Analisis**

Metode analisis yang akan di digunakan dalam evaluasi program pelaksanaan (Musrenbang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari Banai di Kabupaten Dharmasraya yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan dan membandingkan serta menilai kesesuaian pelaksanaan peraturan-peraturan atau standar-

standar dan kesesuaian program. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data

Tahapan yang pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data mentah. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan.

2. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan meliputi analisis logis. Analisis logis diperlukan dalam memberikan pertimbangan mengenai realisasi pelaksanaan program musrenbang. Sehingga dapat menentukan apakah prasyarat awal yang telah dikemukakan program akan tercapai dengan rencana yang dikemukakan.

3. Analisis *congruence* (kesesuaian)

Analisis *congruence* (kesesuaian) merupakan analisis, dimana membandingkan antara program musrenbang di Nagari Banai serta dengan rekapitulasi Musrenbang Kabupaten Dharmasraya serta membandingkan antara program-program Musrenbang (observasi) apakah yang telah direncanakan dalam tujuan telah sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan atau terjadi penyimpangan.

Adapun analisis/kajian yang akan evaluasi realisasi pelaksanaan program Musrenbang adalah sebagai berikut:

- a. **Mengidentifikasi Potensi dan Masalah Nagari Banai**

Analisis ini dilakukan dengan cara merumuskan potensi dan masalah yang ada di Nagari Banai sehingga dapat diketahui program yang mana yang sangat dibutuhkan Masyarakat dalam mengusulkan pada kegiatan Musrenbang.

- b. **Membandingkan Program Hasil Musrenbang Nagari dengan Rekapitulasi Musrenbang Kabupaten**

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan program hasil musrenbang Nagari Banai dengan Rekapitulasi Musrenbang Kabupaten Dharmasraya. Sehingga diketahui apakah seluruh program Musrenbang Nagari tertuang kedalam rekapitulasi Musrenbang Kabupaten



**c. Penilaian Realisasi Pelaksanaan Program Musrenbang Nagari Yang Diterima Dalam Musrenbang Kabupaten**

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan usulan program dari Masyarakat Nagari Banai yang tertuang didalam dokumen RKP Nagari Banai tahun 2017 dan 2018, sehingga dapat diketahui program apa saja yang dibutuhkan

**d. Menilai Manfaat Program Yang Dibutuhkan Nagari Banai**

Analisis ini dilakukan dengan cara menilai manfaat program hasil Musrenbang Nagari. Sehingga diketahui besarnya manfaat program dari hasil Musrenbang tersebut.

**e. Menilai Kendala Terhadap Program Yang Dibutuhkan Namun Belum Terlaksana**

Analisis ini gunanya untuk mengetahui kendala–kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Musrenbang Nagari Banai di Kabupaten Dharmasraya, dengan dilakukannya wawancara kepada pihak–pihak yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab program

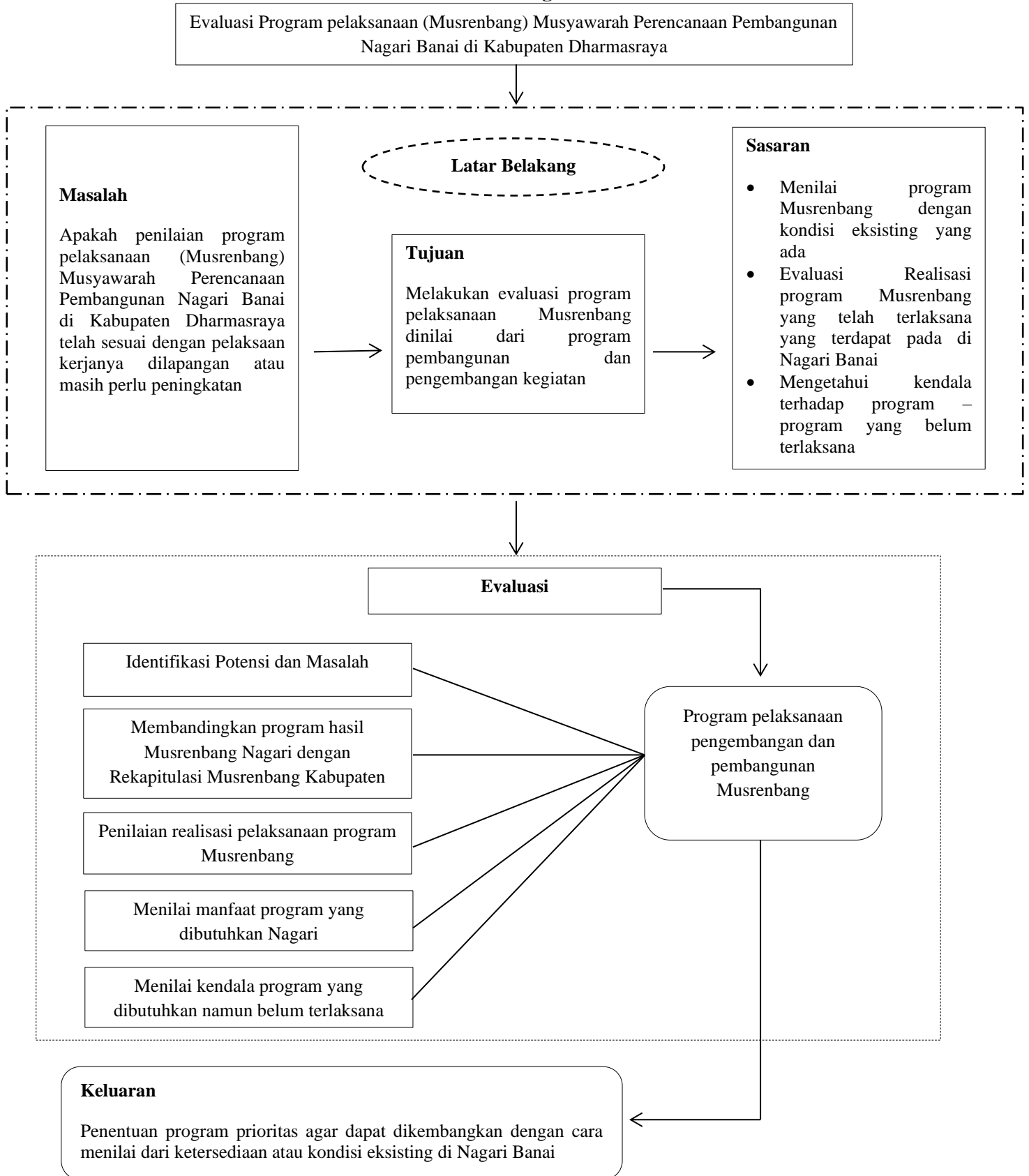
#### **1.6.4 Keluaran**

Adapun keluaran dari penelitian ini yaitu berupa penentuan program prioritas agar dapat dikembangkan dengan cara menilai dari ketersediaan atau kondisi eksisting di Nagari Banai

### 1.6.5 Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 1.2 Kerangka Berfikir**



## **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan dapat di jelaskan secara singkat sub bab yang akan di bahas dalam kajian Evaluasi Program pelaksanaan (Musrenbang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari Banai di Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebagai berikut:

### **Bab 1 Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan studi, rumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup studi, metode analisis, gambaran hasil studi beserta kerangka pemikiran studi dan sistematika penulisan.

### **Bab II Studi Literatur**

Pada bab ini berisikan literatur – literatur yang mendukung analisa tentang kajian studi Evaluasi Program pelaksanaan Musrenbang Nagari Banai di Kabupaten Dharmasraya, berupa standar baku dan teori – teori pendukung tentang Musrenbang.

### **Bab III Gambaran Umum Kawasan Studi**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah studi dan kondisi umum Nagari Banai mencakup batas administrasi, Ketersediaan Lahan, kependudukan, ekonomi, dan infrastruktur Nagari Banai di Kabupaten Dharmasraya

### **Bab IV Analisis Evaluasi Program Musrenbang Nagari Banai**

Bab ini berisi tentang penyajian evaluasi terkait penilaian kesesuaian program Musrenbang dengan kondisi dilapangan, serta penilaian realisasi terhadap pelaksanaan program dan tahapan dari hasil analisis penelitian.

### **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil evaluasi program pelaksanaan (Musrenbang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari Banai di Kabupaten Dharmasraya dan beberapa langkah – langkah yang dijadikan rekomendasi atau saran untuk program yang belum terlaksanakan.